

## **Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program UMKM Dikecamatan Woja, Kabupaten Dompu**

Suci Anggreani<sup>1\*</sup>, Mulyati<sup>2</sup>, Fahrudin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis

<sup>2,3</sup> Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Woja. Penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan aparatur dinas dan pelaku UMKM, observasi non-partisipan terhadap pelaksanaan program, serta studi dokumentasi untuk memperkuat temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas terwujud secara holistik melalui serangkaian program yang saling memperkuat, meliputi pelatihan kapasitas SDM, bantuan sarana produksi, pendampingan usaha dan legalitas, serta fasilitasi pemasaran melalui kemitraan dan promosi digital. Program-program ini terbukti secara signifikan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan, yang termanifestasi dalam kenaikan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, penguatan kemandirian ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Program UMKM, kesejahteraan masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM.

### **Abstract**

*This study aims to analyze in depth the role of the Cooperatives and UMKM Office of Dompu Regency in improving community welfare through the UMKM empowerment program in Woja District. Descriptive qualitative research. Data collection through in-depth interviews with office officials and UMKM actors, non-participant observation of program implementation, and documentation studies to strengthen the findings. The results of the study show that the role of the office is realized holistically through a series of mutually reinforcing programs, including HR capacity training, production facility assistance, business and legality assistance, and marketing facilitation through digital partnerships and promotions. These programs have been proven to have a significant positive impact on improving welfare, which is manifested in increased income, expanded employment opportunities, strengthened economic independence, and improved quality of life for UMKM actors.*

**Keywords:** MSME programs, community welfare, Department of Cooperatives and SMEs.

Copyright (c) 2025 Suci Anggreani<sup>1</sup>

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [anggit@gmail.com](mailto:anggit@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [mulyati@stieyapisdompnu.ac.id](mailto:mulyati@stieyapisdompnu.ac.id)<sup>2\*</sup>,  
[fahrudin@stieyapisdompnu.ac.id](mailto:fahrudin@stieyapisdompnu.ac.id)<sup>3\*</sup>

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar strategis. Sektor ini terbukti

menjadi motor penggerak perekonomian karena kemampuannya menyerap tenaga kerja secara masif dan fleksibilitasnya yang berbasis pada potensi lokal. Data dari (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023) menunjukkan kontribusi luar biasa UMKM yang menyumbang 61% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Sejalan dengan itu, (Tambunan, 2019) juga menegaskan bahwa UMKM memainkan peran krusial dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Untuk menerjemahkan potensi makro tersebut menjadi dampak nyata, peran Pemerintah Daerah melalui lembaga teknis seperti Dinas Koperasi dan UMKM menjadi sangat sentral. Secara ideal, dinas ini berfungsi sebagai fasilitator dan akselerator yang menguatkan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program pemberdayaan.

Akan tetapi, di balik potensi besar dan kerangka kebijakan yang ideal tersebut, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara program yang dijalankan dengan hasil yang dicapai. Fenomena inilah yang teridentifikasi melalui observasi awal di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor UMKM. Meskipun Pemerintah Daerah telah meluncurkan berbagai program intervensi, implementasinya belum menunjukkan dampak yang signifikan. Masalah utama yang teridentifikasi adalah banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala klasik seperti kesulitan akses permodalan, strategi pemasaran yang terbatas, rendahnya literasi digital, serta minimnya pendampingan yang berkelanjutan. Akibatnya, peningkatan kesejahteraan yang diharapkan belum merata, yang diperkuat oleh temuan (Setyowati, 2021) mengenai adanya stagnasi pendapatan dan tingginya ketergantungan pelaku usaha pada bantuan pemerintah.

Kesenjangan antara upaya pemerintah dan kondisi riil para pelaku UMKM inilah yang melahirkan urgensi untuk dilakukannya penelitian. Tanpa evaluasi yang sistematis, program pemberdayaan berisiko menjadi formalitas seremonial yang gagal menyentuh akar persoalan dan tidak memberikan dampak jangka panjang. Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian yang krusial: mengapa intervensi yang dirancang untuk membantu justru belum berhasil secara optimal? Seperti yang ditegaskan (Mulyadi, 2016), keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaannya, tetapi pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena akan memberikan landasan bukti empiris (*evidence-based*) yang dapat digunakan untuk mengkalibrasi ulang arah kebijakan pemberdayaan UMKM di masa depan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran yang telah dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan di Kecamatan Woja. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas program tersebut, baik dari perspektif pelaku usaha maupun dinas terkait. Pada akhirnya, temuan dari studi ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi peran dinas, sehingga program pemberdayaan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## KAJIAN TEORI

### Teori Peran (*Role Theory*)

Dalam ilmu sosial, teori peran (*Role Theory*) menjelaskan bahwa peran adalah seperangkat perilaku, hak, kewajiban, dan norma yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau posisi sosial tertentu dalam suatu struktur sosial (Soekanto, 2012). Dalam konteks penelitian ini, Dinas Koperasi dan UMKM memegang status sebagai lembaga pemerintah daerah, sehingga perannya tidak hanya terbatas pada tugas-tugas administratif, melainkan mencakup serangkaian perilaku yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan. Menurut (Biddle &

Thomas, 1966), analisis peran ini dapat diurai lebih lanjut melalui beberapa dimensi, yang mencakup peran yang diharapkan (*expected role*) oleh masyarakat, peran yang dipersepsikan (*perceived role*) oleh lembaga itu sendiri, peran yang ditampilkan (*enacted role*) dalam tindakan nyata, hingga potensi terjadinya konflik peran (*role conflict*) akibat pertentangan berbagai harapan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini akan memfokuskan analisisnya pada kesenjangan yang terjadi antara peran yang diharapkan oleh para pelaku UMKM dengan peran yang sesungguhnya ditampilkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu.

### **Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik**

Sebagai lembaga pemerintah, tindakan Dinas Koperasi dan UMKM berada dalam kerangka teori pemerintahan daerah dan pelayanan publik. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk "urusan wajib" yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pemberdayaan masyarakat dan pengembangan koperasi serta usaha kecil.

Konsep *New Public Service* (NPS) yang digagas oleh (Denhardt & Denhardt, 2000) relevan dalam konteks ini. NPS menekankan bahwa peran pemerintah adalah "melayani, bukan mengarahkan" (*serve, not steer*). Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator yang membangun kolaborasi dan kepercayaan dengan warga negara. Dalam konteks UMKM, peran Dinas seharusnya bergeser dari regulator yang kaku menjadi mitra strategis yang melayani kebutuhan pelaku UMKM untuk berkembang.

### **Konsep Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)**

Program UMKM yang dijalankan oleh dinas pada hakikatnya adalah program pemberdayaan. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebuah proses di mana individu atau kelompok yang kurang berdaya didorong untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas kehidupan dan nasib mereka sendiri (Ife & Tesoriero, 2008). Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan meningkatkan kapasitas dan kemandirian.

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif berskala kecil yang dikelola secara mandiri oleh individu atau kelompok, dengan karakteristik modal, tenaga kerja, dan teknologi yang terbatas (Tambunan, 2019). Usaha ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dibedakan berdasarkan skala aset, omzet, serta kompleksitas manajemennya. Untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan sektor vital ini, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan yang dirancang secara komprehensif. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan dan pelatihan, dukungan operasional berupa fasilitasi permodalan dan bantuan sarana, serta pendampingan usaha guna memperkuat manajemen dan kemampuan adaptasi pasar. Lebih lanjut, dukungan ini juga menyentuh aspek krusial lainnya seperti fasilitasi pemasaran produk melalui promosi dan digitalisasi, hingga upaya penguatan jaringan usaha dan kemitraan untuk membuka akses pasar, teknologi, serta modal yang lebih luas.

### **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari setiap upaya pembangunan dan dapat diukur melalui beberapa indikator yang saling berkaitan. Indikator paling fundamental adalah peningkatan pendapatan, yang secara langsung mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak sekaligus menjadi cerminan produktivitas ekonomi suatu wilayah (Todaro & Smith, 2015). Selanjutnya, kesejahteraan juga tecermin dari terciptanya kesempatan kerja dan lapangan usaha yang lebih

luas, sebab menurut (Suharto, 2006), pembangunan yang berhasil harus mampu menyediakan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan bagi warganya. Lebih dari sekadar memiliki pekerjaan, tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ditandai oleh tercapainya kemandirian ekonomi, di mana para pelaku usaha memiliki kontrol dan kemampuan untuk mengelola serta mengembangkan usahanya secara mandiri sebagai buah dari proses pemberdayaan (Soetomo, 2014). Pada akhirnya, semua indikator tersebut bermuara pada peningkatan kualitas hidup yang menyeluruh, sebuah konsep holistik yang tidak hanya menilai sisi materi, tetapi juga meliputi aspek fisik, sosial, dan psikologis seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan yang layak, serta rasa aman (Nugroho, 2003).



*Sumber. Peneliti 2025*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan memaparkan secara mendalam peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan di Kabupaten Dompu. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi berbagai teknik. Data primer diperoleh melalui observasi non-partisipan pada pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan usaha, serta melalui wawancara semi-terstruktur dengan sejumlah informan kunci. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih sumber data utama yang relevan, seperti kepala dinas, staf pelaksana, dan pelaku UMKM binaan, yang kemudian dikembangkan dengan teknik *snowball sampling* untuk memperluas cakupan dan kedalaman informasi. Data primer tersebut selanjutnya diperkuat dengan pengumpulan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi dinas, laporan kegiatan, foto, video dokumentasi, serta regulasi dan artikel ilmiah yang relevan.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama yang berjalan secara simultan: reduksi data untuk memilih dan memfokuskan informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi atau matriks agar mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian, dilakukan proses verifikasi melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan memeriksa silang data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Proses metodologis yang sistematis ini dilakukan guna memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik secara akurat menggambarkan kontribusi nyata program pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Dinas dalam Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan

Salah satu peran utama yang dijalankan Dinas Koperasi dan UMKM adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa program ini, khususnya yang berfokus pada literasi keuangan dan pemasaran digital, terbukti efektif dalam mentransformasi cara kerja para pelaku UMKM. Hal ini tergambar jelas dalam penuturan Ibu Fatimah, seorang pelaku UMKM pengolahan makanan ringan, yang menyatakan bahwa pelatihan telah mengubahnya dari sosok yang gagap teknologi menjadi penjual yang mahir memanfaatkan platform online.

*“Saya ikut pelatihan dari Dinas di aula kelurahan awal tahun kemarin. Pelatihannya tentang cara menghitung modal, ngatur keuangan usaha, sama belajar bikin akun jualan online. Awalnya saya gptek, tapi setelah ikut pelatihan itu saya bisa jualan lewat WhatsApp dan Shopee. Sekarang pesanan datang bukan cuma dari sekitar Dompu, tapi juga dari Sumbawa.” (Wawancara dengan Fatimah, 3 Juni 2025).*

Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh Ibu Suryani, pemilik usaha camilan “Dompu Crunch”. Ia merasakan manfaat langsung dari pelatihan e-commerce dalam memperluas jangkauan pasarnya. “Dari pelatihan itu saya belajar cara membuat katalog produk, membuka toko online, dan mengelola penjualan melalui aplikasi. Sebelumnya saya hanya jualan di warung, sekarang saya sudah punya pelanggan dari luar Dompu karena jualan lewat marketplace,” ungkapnyanya (Wawancara, 4 Juni 2025).

Dari sisi kelembagaan, Bapak Nasrullah selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro menjelaskan bahwa program ini dirancang secara inklusif dan strategis. Pelatihan tidak hanya menasar aspek teknis, tetapi juga penguatan mentalitas kewirausahaan bagi berbagai kalangan.

*“Kami rutin mengadakan pelatihan di kantor maupun langsung ke komunitas masyarakat. Fokus kami bukan hanya pada peningkatan keterampilan teknis, tapi juga penguatan mentalitas kewirausahaan. Sasaran kami meliputi pemuda putus sekolah, pelaku UMKM pemula, hingga pelaku usaha lama yang ingin mengembangkan usahanya.” (Wawancara dengan Nasrullah, 4 Juni 2025).*

Secara keseluruhan, temuan pada aspek ini menunjukkan bahwa peran dinas melalui program pelatihan telah berhasil menjadi katalisator bagi kemandirian ekonomi. Peningkatan keterampilan digital secara langsung berimplikasi pada perluasan pasar, yang kemudian berdampak pada peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha. Hal ini sejalan dengan indikator kesejahteraan, di mana pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh.

### Peran Dinas dalam Penguatan Modal Melalui Bantuan Sarana

Selain peningkatan kapasitas SDM, peran dinas juga diwujudkan melalui intervensi langsung berupa bantuan sarana dan prasarana. Bantuan ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas produksi dan daya tarik produk. Ibu Siti Rohani, seorang pelaku UMKM kue tradisional yang menerima bantuan etalase dan peralatan dapur, merasakan dampak langsung dari program ini.

*"Saya sangat bersyukur sekali sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah... Bantuan yang saya terima berupa etalase kaca dan peralatan dapur, itu sangat membantu usaha kue tradisional saya... Sekarang, dengan etalase yang baru, kue-kue saya bisa disusun lebih rapi dan kelihatan bersih. Pelanggan jadi lebih tertarik datang. Alhamdulillah, setelah ada bantuan ini, omzet saya meningkat dan saya bisa bantu ekonomi keluarga. Saya juga jadi lebih semangat mengembangkan usaha, karena merasa diperhatikan." (Wawancara dengan Siti Rohani, 7 Juni 2025).*

Kesaksian Ibu Siti Rohani menunjukkan adanya efek berantai yang positif. Bantuan sarana tidak hanya berfungsi sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai pemicu psikologis yang meningkatkan motivasi dan semangat wirausaha. Peningkatan kualitas display produk secara langsung meningkatkan minat konsumen, yang berujung pada peningkatan omzet. Dampak ini secara nyata berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup keluarga, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi pelaku usaha.

### **Peran Dinas dalam Perluasan Pasar Melalui Fasilitasi Pemasaran**

Fasilitasi pemasaran merupakan salah satu peran krusial dinas untuk membantu UMKM "naik kelas". Strategi ini diimplementasikan melalui dua jalur utama: kemitraan dengan ritel modern dan promosi melalui event berskala besar. Kemitraan dengan jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart terbukti menjadi langkah efektif untuk penetrasi pasar yang lebih luas. Ibu Nurhayati, pemilik usaha keripik pisang "Tana Dompu", menyatakan bahwa setelah produknya difasilitasi masuk ke ritel modern, omzet penjualannya meningkat secara konsisten dan jangkauan pasarnya meluas hingga ke luar Kabupaten Dompu, yang pada akhirnya meningkatkan kestabilan ekonomi rumah tangganya (Wawancara, 6 Juni 2025).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ibu Hj. Daryati Kustilawati, SE., M.Si., menegaskan bahwa strategi ini lebih dari sekadar menjual produk.

*"Kerja sama ini tidak hanya soal penjualan produk di toko besar, tetapi juga tentang bagaimana UMKM Dompu dapat meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Dinas juga siap memberikan pendampingan menyeluruh dalam berbagai aspek agar pelaku usaha dapat tumbuh secara mandiri dan konsisten."*

Sementara itu, fasilitasi melalui event berskala nasional dan internasional juga membuka peluang pasar yang lebih besar. Menurut Bapak Wahyoni dari dinas terkait, keterlibatan UMKM Dompu dalam event seperti MotoGP Mandalika memberikan pengalaman berharga dan eksposur internasional.

*"Kegiatan promosi ini memberikan pengalaman nyata kepada pelaku UMKM dalam menghadapi pasar yang lebih kompleks dan beragam. Hal ini terbukti dari banyaknya produk Dompu, seperti makanan olahan dan kerajinan tangan, yang menarik minat konsumen internasional di event MotoGP Mandalika." (Wawancara dengan Wahyoni, 12 Juni 2025).*

Analisis pada bagian ini menunjukkan bahwa peran dinas dalam fasilitasi pemasaran sangat strategis. Melalui kemitraan dan promosi, dinas tidak hanya membuka "pintu" pasar baru, tetapi juga mendorong peningkatan standar kualitas dan daya saing produk, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

### **Peran Dinas dalam Peningkatan Profesionalisme Melalui Pendampingan Usaha**

Pendampingan usaha, khususnya dalam hal pengurusan legalitas, menjadi wujud nyata peran dinas dalam meningkatkan profesionalisme UMKM. Banyak pelaku usaha yang awalnya merasa kesulitan mengurus perizinan karena proses yang rumit dan kurangnya informasi. Program fasilitasi legalitas dari dinas terbukti mampu mengatasi kendala tersebut. Bapak Tommy, seorang pelaku usaha makanan olahan, mengungkapkan pengalamannya:

*"Sebelum adanya program dari Dinas Koperasi ini, saya kesulitan mengurus izin seperti NIB dan SPP-IRT karena kurangnya informasi dan proses yang terasa rumit. Tapi setelah difasilitasi oleh dinas, semua jadi lebih mudah dan cepat. Sekarang produk saya sudah punya izin resmi dan bisa masuk ke toko modern bahkan ikut pameran. Ini sangat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk saya." (Wawancara dengan Tommy, 18 Juni 2025).*

Komitmen untuk mendorong UMKM "naik kelas" ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Nurhayati, S.E., M.Si., selaku Kepala Bidang UMKM. Ia menyatakan bahwa pendampingan legalitas mulai dari NIB, SPP-IRT, sertifikasi halal, hingga hak merek adalah upaya sistematis agar UMKM mampu bersaing di tingkat yang lebih luas.

Temuan ini menggarisbawahi bahwa legalitas usaha adalah fondasi penting bagi pertumbuhan. Dengan memiliki izin resmi, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses ke pasar formal yang lebih luas, tetapi juga membangun kredibilitas dan kepercayaan konsumen, yang merupakan modal penting untuk keberlanjutan dan peningkatan skala usaha.

### **Peningkatan Kapasitas SDM sebagai Fondasi Pemberdayaan**

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas berhasil menjadi fondasi awal bagi pemberdayaan pelaku UMKM, terutama dalam meningkatkan keterampilan teknis dan literasi digital. Kesaksian dari Ibu Fatimah dan Ibu Suryani yang kini mahir memanfaatkan platform e-commerce adalah bukti nyata dari keberhasilan ini. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori pemberdayaan dari (Zimmerman, 2000), yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses di mana individu mendapatkan kontrol lebih besar atas kehidupannya. Dalam konteks ini, pelatihan tidak hanya mentransfer keterampilan (*skill*), tetapi yang lebih penting adalah mentransfer kontrol dan agensi (*agency*) kepada pelaku usaha. Mereka kini memiliki kendali atas kanal pemasaran, interaksi dengan pelanggan, dan pada akhirnya, aliran pendapatan mereka. Peningkatan kepercayaan diri yang mereka rasakan adalah manifestasi dari pemberdayaan psikologis yang menyertai pemberdayaan ekonomi.

Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi riset sebelumnya oleh (Suryani, 2019) yang mengaitkan pelatihan kewirausahaan dengan pertumbuhan usaha, tetapi juga memperluasnya dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis komunitas (*Community Economic Development*). Pendekatan dinas yang turun langsung ke masyarakat mencerminkan prinsip CED, di mana pemberdayaan ekonomi digerakkan dari potensi dan kebutuhan lokal, sehingga hasilnya lebih relevan dan berkelanjutan.

### **Bantuan Sarana sebagai Pemicu Produktivitas dan Motivasi**

Intervensi melalui bantuan sarana produksi, seperti yang dialami oleh Ibu Siti Rohani, menunjukkan bahwa dukungan material memiliki dampak ganda: fungsional dan psikologis. Secara fungsional, peralatan baru secara langsung meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas tampilan produk, yang berujung pada peningkatan omzet. Namun, analisis yang lebih dalam menunjukkan keselarasan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Bantuan alat kerja dapat dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman (*safety needs*) bagi sebuah usaha.

Ketika fondasi ini terpenuhi, pelaku usaha seperti Ibu Siti Rohani dapat bergerak menuju tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu aktualisasi diri, yang dalam hal ini diwujudkan melalui semangat dan motivasi untuk mengembangkan usahanya secara mandiri.

Hal ini memperkuat temuan (Wibowo, 2020) mengenai peran penting sarana dalam meningkatkan daya saing UMKM. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi psikologis, di mana bantuan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk perhatian dan pengakuan dari pemerintah. Perasaan "diperhatikan" ini menjadi pendorong motivasi non-material yang sangat kuat, yang seringkali luput dari analisis kebijakan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi.

### **Perluasan Akses Pasar sebagai Mesin Pertumbuhan Usaha**

Strategi fasilitasi pemasaran yang diterapkan dinas, baik melalui kemitraan dengan ritel modern maupun promosi di event besar, terbukti menjadi mesin pertumbuhan yang efektif. Temuan ini secara jelas menggambarkan aplikasi dari teori akses pasar (*market access theory*), di mana Dinas Koperasi dan UMKM berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menjembatani pelaku usaha mikro dari pasar lokal yang terbatas ke pasar formal yang lebih luas dan terstruktur. Keberhasilan Ibu Nurhayati menembus pasar ritel modern adalah contoh konkret bagaimana dukungan kelembagaan mampu mengatasi hambatan masuk pasar. Hal ini sejalan dengan kesimpulan (Pratiwi, 2021) yang menekankan pentingnya sinergi kelembagaan untuk keberhasilan UMKM.

Inovasi seperti program digitalisasi "Amanda Manopo" juga menjadi jawaban atas tantangan pasar di era digital. Inisiatif ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar secara geografis, tetapi juga memperkuat posisi tawar pelaku usaha, sejalan dengan pandangan (Wibowo, 2020) mengenai peran krusial teknologi digital dalam menciptakan peluang ekonomi baru bagi usaha kecil. Dengan demikian, peran dinas tidak hanya membuka 'pintu' pasar, tetapi juga membekali UMKM dengan 'kunci' digital untuk memasukinya.

### **Pendampingan Legalitas sebagai Jalan Menuju Profesionalisme dan Keberlanjutan**

Pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha (NIB, SPP-IRT, Halal) merupakan intervensi strategis yang mendorong transformasi UMKM dari sektor informal ke formal. Dampak positif yang dirasakan Bapak Tommy, di mana legalitas membuka akses ke pasar modern dan meningkatkan kepercayaan konsumen, dapat dianalisis melalui kerangka pemberdayaan ekonomi dari (Kabeer, 1999). Dalam kerangka ini, legalitas berfungsi sebagai sumber daya (*resources*) yang vital. Kepemilikan sumber daya ini memberikan pelaku UMKM kemampuan untuk bertindak (*agency*), seperti memilih untuk masuk ke pasar ritel, yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian (*achievement*) berupa peningkatan kredibilitas dan omzet.

Temuan ini konsisten dengan riset (Andini, 2022) yang menunjukkan korelasi positif antara legalitas usaha dengan kemudahan akses pembiayaan dan kemitraan. Peran dinas di sini bukan sekadar fasilitator administratif, melainkan sebagai akselerator yang mendorong UMKM untuk naik kelas, membangun fondasi profesionalisme yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang.

## **SIMPULAN**

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu telah menjalankan perannya secara efektif dan multifaset dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM. Peran ini diwujudkan melalui dua pilar strategis utama: penguatan kapasitas internal pelaku usaha dan fasilitasi akses terhadap sumber daya eksternal.

Penguatan kapasitas internal tercapai melalui program pelatihan dan pengembangan SDM yang terbukti berhasil meningkatkan kemandirian dan literasi digital pelaku usaha. Di sisi lain, pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha telah mendorong profesionalisme dan daya saing produk. Sementara itu, fasilitasi akses terhadap sumber daya eksternal

diimplementasikan melalui bantuan sarana produksi yang secara langsung meningkatkan efisiensi dan omzet, serta perluasan akses pasar melalui kemitraan strategis dengan ritel modern dan promosi produk yang inovatif seperti program Amanda Manopo. Secara sinergis, keseluruhan program ini terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penguatan kemandirian ekonomi, serta perbaikan kualitas hidup para pelaku UMKM di Kabupaten Dompu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penelitian berjudul "Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program UMKM di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu". Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dompu, khususnya kepada Ibu Kepala Dinas Hj. Daryati Kustilawati, Bapak Nasrullah, dan Ibu Nurhayati atas segala izin, dukungan, dan informasi yang diberikan. Apresiasi tertinggi juga ditujukan kepada seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Woja yang telah menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak.

## Referensi :

- Griffin, K., & McKinley, T. (1994). *Towards a Human Development Strategy*. New York: UNDP.
- Hasibuan, M. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Laporan Tahunan UMKM Nasional*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran* (Edisi ke-13). Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2010). *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. (2016). *Evaluasi Program Pemerintah Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2011). *Manajemen Strategi dalam Organisasi Pemerintah*. Jakarta: Gramedia.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage*. New York: Free Press.
- Setyowati, H. (2021). Evaluasi Dampak Program UMKM terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 55–63.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, H. (2015). *Kemitraan Strategis UMKM dan Koperasi*. Surabaya: LPPM UNESA.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th Edition). Pearson Education.
- Wahyuni, S. (2018). Peran Pemerintah dalam Pemasaran Produk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 7(1), 32–45.
- WHO. (1997). *Measuring Quality of Life*. Geneva: World Health Organization.
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological Empowerment: Issues and Illustrations. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 581–599.
- Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2005). *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.